

ABSTRAK

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tentang sengketa tanah maka dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah perlu mengadakan penyempurnaan pada ketentuan untuk mengatur pendaftaran tanah, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum di bidang pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah memerlukan kesadaran hukum dari warga masyarakat. Peran notaris PPAT sangat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi kemudian sejauh mana hal ini telah dilakukan perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahannya adalah bagaimana peran Notaris/PPAT dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Pati menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan kedua adalah apa hambatan dan solusi peran Notaris/PPAT dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Pati. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris/PPAT dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Pati menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dikatakan belum berhasil, karena kurangnya sosialisasi dari Notaris/PPAT yang merata ke daerah-daerah pinggiran kota Pati dimana masyarakat tersebut masih buta akan hukum. Penyuluhan hukum oleh notaris hanya dilakukan untuk kliennya di kantornya sendiri, sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hambatan Notaris/PPAT dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Pati yaitu faktor eksternal dan internal. Jenis kendalanya adalah mahal nya biaya terkait dengan pajak, prosedur ribet, sengketa tanah, SDM petugas, fasilitas, anggaran, medan wilayah, minimnya pengetahuan masyarakat dan jual beli tanah di bawah tangan oleh masyarakat. Solusi dari hambatan ini adalah kebijakan-kebijakan untuk dapat menghilangkan hambatan yang terjadi. Sebaiknya notaris PPAT meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah maupun Non Government Organization dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Kabupaten Pati. Notaris harus menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk dapat meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat seperti menjalin kerjasamanya dengan pekerja media, untuk ikut mensosialisasikan pentingnya mendaftarkan hak atas tanah supaya tidak tersedang sengketa Hukum kedepannya.

Kata Kunci: peran notaris, kesadaran hukum, pendaftaran tanah

ABSTRACT

In connection with various issues regarding land disputes, in order to increase the legal awareness of the community to register land rights, it is necessary to make improvements to the provisions for regulating land registration. This is intended to provide legal certainty in the land sector. Registration of land rights requires legal awareness from community members. The role of the PPAT notary is very much needed in increasing community legal awareness, but then the extent to which this has been done needs to be further investigated. The problem is how the role of Notary / PPAT in increasing public legal awareness in registering land rights in Pati Regency according to Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration. The second problem is what are the obstacles and solutions to the role of the Notary / PPAT in raising public legal awareness to register land rights in Pati Regency. The method used is analytical descriptive in accordance with the problems that have been formulated. The data used are primary data, secondary data and tertiary data that can support the assessment, which is then analyzed to draw conclusions. The results showed that the role of the Notary / PPAT in increasing community legal awareness to register land rights in Pati Regency according to Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration could be said to have not succeeded, due to a lack of socialization from Notaries / PPAT that were evenly distributed to the regions suburb of Pati where the community is still blind to the law. Legal counseling by a notary is only done for his clients in his own office, as fulfillment of obligations under Law No. 30 of 2004 Junco Act No. 2 of 2014. Notary / PPAT barriers in raising public legal awareness to register land rights in Pati Regency namely external and internal factors. The type of constraints is the high costs associated with taxes, complicated procedures, land disputes, human resource personnel, facilities, budgets, terrain, lack of public knowledge and the sale and purchase of land under the hands of the community. The solution to this obstacle is policies to be able to eliminate the obstacles that occur. It is better if the PPAT notary increases cooperation with both the government and Non Government Organization in increasing legal awareness in the Pati Regency community. Notaries must collaborate with other parties to be able to raise awareness of legal community such as establishing cooperation with media workers, to participate in socializing the importance of registering land rights so as not to contain legal disputes in the future

Keywords: the role of the notary, legal awareness, land registration